



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XIX

TEROBOSAN MENGATASI
KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI



Lampung, 18 - 20 Oktober 2017



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XIX**

**TEROBOSAN MENGATASI
KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI**

Lampung, 18 - 20 Oktober 2017

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XIX

TEROBOSAN MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI

Lampung, 10 – 20 Oktober 2017

Editors:

Sri Adiningsih
Mangara Tambunan
Ahmad Erani Yustika
Pos M. Hutabarat
Anton H. Gunawan
Denni P. Purbasari

Hermanto Siregar
Bustanul Arifin
Aviliani
Edy Suandi Hamid
Lincoln Arsyad
Nimmi Zulfainarni

Ina Primiana
Yohannes Kadarusman
Rimawan Pradipto
Firman S. Parningotan

Penyusun:

Y. Sri Susilo
Rokhedi P. Santoso
Firman S. Parningotan
Efrilia Sukmagraha
Rian N. Sandi

Dipublikasi oleh:
Pengurus Pusat – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia



Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII
**Terobosan Mengatasi Kesenjangan
Sosial Ekonomi**
Editor, Hermanto Siregar...[et al.].
Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

ISBN 978-602-14722-1-7

Jl. Daksa IV / 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. : +62 21 720 8130 / 722 2463, Fax. : +62 21 720 1812
Email : isei.pusat@gmail.com
Hak Cipta PP - ISEI, 2013

SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XIX
TEROBOSAN MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI
Swiss-Belhotel Lampung, 18 – 20 Oktober 2017

TERM OF REFERENCE

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam 15 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan telah berhasil dipangkas hingga separuh, dari 24% pada tahun 1999 menjadi 11.3% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan pada angka rata-rata 6% per tahun hingga tahun 2015. Disamping itu, Indonesia juga bisa masuk menjadi anggota G-20 sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Namun perjuangan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi belum berakhir. Bahkan, pasca 2014 tingkat kemiskinan mengalami stagnasi, namun kesenjangan sosial ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Keterkaitan antara kesenjangan dengan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya difahami. Masalah kesenjangan (*inequality*) secara umum dapat menggambarkan: (1) bagaimana persebaran tingkat pendapatan (kekayaan) antar individu di dalam populasi, dan (2) persebaran tingkat pendapatan (kekayaan) antar daerah di dalam suatu negara. Dalam konteks kesenjangan yang pertama, laporan Bank Dunia terbaru "*Indonesia's Rising Divide*" (2016) mengungkapkan bahwa masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan, karena hanya 20% dari penduduk kaya Indonesia yang mampu menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi pada satu dekade terakhir, sementara 80% lainnya – sekitar 205 juta penduduk – tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Laporan Bank Dunia tersebut juga mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi masalah konsentrasi kesejahteraan tertinggi (*high wealth concentration*) di dunia, dimana 10% masyarakat Indonesia terkaya menguasai 77% kekayaan negara. Lebih buruk lagi, konsentrasi kekayaan ini meningkat lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, pendapatan dari kekayaan ini terkadang dikenai tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pekerja, namun dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Artinya, Indonesia akan menghadapi masalah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin parah pada masa datang. Kesenjangan yang terus meningkat di masyarakat ini berpotensi merusak kohesi sosial, stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka panjang, serta mengancam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Semakin memburuknya masalah kesenjangan sosial ekonomi ini ditunjukkan oleh nilai koefisien Gini Indonesia yang meningkat dari 0.30 pada tahun 2000 menjadi 0.41 pada tahun 2015. Survey Bank Dunia terhadap sebagian masyarakat Indonesia mengungkapkan bahwa distribusi pendapatan ini bersifat "*very unequal*" atau "*not equal at all*". Kesenjangan pendapatan di Indonesia saat ini lebih buruk dari beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Vietnam, Cambodia dan Laos, namun sedikit lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan China.

World Bank telah mengidentifikasi keberadaan empat faktor penyebab meningkatnya kesenjangan ekonomi tersebut, yaitu: *inequality of opportunity* (ketidaksamaan kesempatan), *unequal jobs* (ketidaksamaan dalam pekerjaan), *high wealth concentration* (terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya), serta *low resiliency* (rendahnya resiliensi).

Dalam menghadapi masalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi antar individu di dalam masyarakat ini, Indonesia perlu untuk mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, seperti: pengembangan layanan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat (dalam aspek pendidikan dan kesehatan); pengembangan program-program pelatihan dan keterampilan bagi angkatan kerja; serta mengembangkan kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta bantuan-bantuan sosial ekonomi lainnya bagi rumah tangga yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan ekonomi antar daerah (wilayah) juga merupakan masalah klasik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah cenderung mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa dan kurang memperhatikan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan antar daerah. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Kesenjangan antar daerah di Indonesia meningkat karena beberapa faktor, diantaranya: (1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (2) kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta (5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2015 menunjukkan bahwa persebaran daerah tertinggal lebih banyak di Kawasan Timur Indonesia, yakni 103 kabupaten (84,43%), sementara di Kawasan Barat Indonesia mencapai 19 kabupaten (15,57%). Keteringgalan antar daerah ini harus segera diakhiri dengan mewujudkan pembangunan pada semua aspek kehidupan secara merata, adil, dan mensejahterahkan rakyat secara menyeluruh. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah harus memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kemudahan akses bagi sumber daya manusia pelaku pembangunan di daerah tertinggal.

Mengingat kesenjangan antar individu maupun kesenjangan antar daerah merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan pelik di Indonesia, maka Tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX tahun 2017 adalah “**Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi**”. Seminar Nasional dan Sidang Pleno akan dilaksanakan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Tujuan utama dari kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX adalah untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menggambarkan kesenjangan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat Indonesia
- 2) Menemukan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan di masyarakat dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan sosial-ekonomi
- 3) Merumuskan rekomendasi yang konstruktif dari berbagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) ISEI dalam rangka pemerataan pembangunan guna menurunkan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia

Untuk mendapatkan masukan dalam bentuk paper dari berbagai pemangku kepentingan ISEI, baik dari unsur akademisi (dosen dan mahasiswa), birokrat dan pembuat kebijakan pemerintah, pengamat, serta praktisi (pelaku usaha), maka

Undangan Penulisan karya ilmiah (*Call for Papers*) mengacu pada sub tema sebagai berikut:

- 1) Politik Anggaran dalam Mengatasi Kesenjangan
- 2) Reforma Agraria: Aset dan Akses
- 3) Model Pembiayaan UMKM dan Pertanian
- 4) Pemenuhan Hak Dasar: Sandang, Pangan, dan Papan

- 5) Kualitas Layanan Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
- 6) Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- 7) Kemitraan Usaha antara BUMN, Swasta, dan UMKM

Selain *Call for papers*, Pengurus Pusat ISEI juga akan melakukan kegiatan penelitian terbatas (*small research*) yang diharapkan dapat melibatkan peranserta anggota ISEI daerah untuk merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. ISEI Cabang yang akan melaksanakan riset terkait isu kesenjangan adalah:

- 1) ISEI Lampung
- 2) ISEI Makasar
- 3) ISEI Cirebon
- 4) ISEI Mataram

PELAKSANAAN

Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu s/d Jum'at
Tanggal : 18 – 20 Oktober 2017
Tempat : Swiss-Belhotel Lampung
Jalan H.R. Rasuna Said No. 18, Lampung, Indonesia
[+62-721-8017777](tel:+62-721-8017777)
lampung-sbla@swiss-belhotel.com

PESERTA

Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX terdiri dari dua kegiatan yaitu Seminar Nasional dan Sidang Pleno:

1. Seminar Nasional bisa diikuti oleh berbagai kalangan baik pembuat kebijakan, pelaku usaha, pengamat, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum lain yang berkepentingan.
2. Sidang/Rapat Pleno hanya bisa diikuti oleh Pengurus Pusat ISEI dan Ketua Cabang ISEI di seluruh Indonesia.

SEKRETARIAT

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta
12110Telp. 722 2463 | Fax : 720 1812
Email : isei.pusat@gmail.com
HP : Kusnadi (0813 1022 5377),
Nuni (0856 9330 1640)

ISEI Cabang Lampung

FEB Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung 35145
Ketua ISEI Lampung:
Dr. Ayi Ahadiat
Email: ayi.ahadiat@gmail.com
HP: 0812-8888-1531

SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XIX
TEROBOSAN MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI
Swiss-Belhotel Lampung, 18 – 20 Oktober 2017

JADWAL ACARA

Rabu, 18 Oktober 2017

18.30 – 19.25	Makan Malam bertempat di Swiss-Belhotel Lampung
19.25 – 19.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
19.30 – 19.35	Pembacaan Doa
19.35 – 19.45	Sambutan Tokoh Masyarakat Lampung
19.45 – 19.55	Laporan Ketua Panitia Pelaksana Daerah (Dr Ayi Ahadiat)
19.55 – 20.05	Laporan Ketua Panitia Pelaksana Pusat, (Dr. Prasetyono W.M. Joedo)
20.05 – 20.15	Tari Sembah Lampung
20.15 – 20.30	Sambutan Ketua Umum PP-ISEI (Dr. Muliaman D. Hadad)
20.30 – 20.45	Sambutan Gubernur Lampung Pembukaan Sidang Pleno ISEI XIX oleh Gubernur Lampung
20.45 – 21.00	<i>Keynote Speech</i> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Dr. Darmin Nasution): "Kebijakan Ekonomi dalam Mengatasi Kesenjangan"
21.00 – 22.00	Ramah Tamah

Kamis, 19 Oktober 2017

08.00 – 08.30	Pendaftaran
08.30 – 09.00	<i>Keynote Speech</i> Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan): "Pembangunan Kemaritiman untuk Mengatasi Kesenjangan dan <i>Middle Income Trap</i> "
09.00 – 10.00	Paparan hasil Small Research (Prof. Dr. Yusman Syaukat)
10.00 – 11.30	Plenary Session I : Politik Anggaran dan Keberpihakan Negara Pembicara: <ol style="list-style-type: none">1. Andi ZA Dulung (Direktur Jenderal (Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI): "Alokasi dan Implementasi Anggaran Negara untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi"2. Erwin Aksa (Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Konstruksi dan Infrastruktur): "Partisipasi Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur untuk mengatasi Kesenjangan antar Wilayah"3. Dr. Subandi Sardjoko (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas): "Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat dalam mengatasi Kesenjangan" Moderator : Prof. Dr. M. Ikhsan
11.30 – 12.15	Diskusi dan Tanya Jawab
12.15 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 14.00	Parallel Session I (Pemenang Call for Papers) Parallel IA (Ketimpangan) <ol style="list-style-type: none">1. Achmad Rifa'i & Nurvita Retnama Dewi: "Mampukah Fiskal Indonesia Mengurangi Ketimpangan Pendapatan?"2. Muh. Amir Arham & Yusrin Hasan: "Transfer Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia"3. Mudrajad Kuncoro: "Ketimpangan Indonesia: Tren, Penyebab, dan Terobosan Kebijakan" Pembahas : ISEI Bandung Moderator : ISEI Banten

Parallel IB (Kemiskinan)

1. Felia Novianti, Rina Rosalina & Adhitya Wardhono: "Sintesa Inklusi Keuangan dan Sinergitas BUMN: Usulan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia"
2. Siti Nuraini: "Asset Dana Bergulir dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Kesenjangan di Daerah"
3. Gendut Sukarno: "Analisis Pendanaan Program Strategis Kementerian KUKM RI Dalam Pengentasan Kemiskinan"

Pembahas : ISEI Bengkulu

Moderator : ISEI Jambi

Parallel IC (Konsumsi RT & Pangan)

1. Eka Prianti, Bustanul Arifin & Adia Nugraha: "Peran Kebijakan Raskin Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung"
2. Dwi Fatma Almunawaroh & Eny Sulistyaningrum: "Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia"
3. Kumara Jati: "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Pangan Pokok di Indonesia"

Pembahas : ISEI Salatiga

Moderator : ISEI Jember

14.00 – 14.30

Diskusi dan Tanya Jawab

14.30 – 14.45

Rehat

14.45 – 15.45

Parallel Session II (Pemenang Call for Papers)

Parallel IIA (Kredit & Belanja Publik)

1. Atik Purmiyati & Retno Setyowati: "Peranan Kredit Usaha Rakyat Untuk Mengurangi Kemiskinan"
2. Kodrat Wibowo, Eka Desy Purnama & Wawan Hermawan: "Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Sektoral dan Belanja Publik: Kasus Kota Cimahi 2009-2015"
3. Aji Sofyan Effendi & Muhammad Ikbal: "Reformulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-MIGAS) Menuju Transformasi Ekonomi Indonesia"

Pembahas : ISEI Pontianak

Moderator : ISEI Surabaya

Parallel IIB (Wirausaha & Kesejahteraan)

1. Agni Alam Awirya, Wilda Tri Farizqi & Suarpika Bimantoro: "Apakah Pengembangan Destinasi Wisata Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"
2. Muhammad Ghafur Wibowo & Rizki Nurfadhli: "Faktor-faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Periode Tahun 2010-2015"
3. Irman Firmansyah & Agus Ahmad Nasrulloh: "Masalah dan Solusi Pengembangan Wirausaha Kreatif Berbasis Syariah: Aplikasi Metode ANP"

Pembahas : ISEI Padang

Moderator : ISEI Tasikmalaya

15.45 – 16.15

Diskusi dan Tanya Jawab

16.15 – 18.00

Kunjungan dan/atau Wisata

18.00 – 18.15	Menuju tempat Dinner Talk bertempat di KPw Bank Indonesia Lampung
18.30 – 18.40	Sambutan Pemerintah Daerah
18.40 – 19.10	<i>Dinner Talk</i> oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (Mirza Adityaswara) "Kebijakan Bank Indonesia dalam Mengatasi Kesenjangan"
19.10 – 20.00	Ramah Tamah dan Makan Malam di Bank Indonesia KPw Lampung
20.00 – 22.00	Sidang Organisasi (Khusus untuk Pengurus Pusat ISEI dan seluruh Ketua Cabang ISEI se Indonesia)

Jum'at, 20 Oktober 2017

08.30 – 10.00	Plenary Session II: Pembicara: Model Pembiayaan Ekonomi Rakyat 1. Yunita Resmi Sari (Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia): "Peningkatan Akses Jasa Keuangan Masyarakat Perdesaan dan Pesisir" 2. Emma Sri Martini (Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero): "Komitmen Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha" 3. Dewi Sartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria /KPA): "Reforma Agraria dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi" Moderator : Prof. Dr. Hermanto Siregar
10.00 – 10.30	Diskusi Dan Tanya Jawab
10.30 – 10.45	Perumusan Hasil Sidang Pleno
10.45 – 11.00	Pidato Penutupan oleh Wakil Ketua Umum ISEI Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro Konferensi Pers (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua SC & Ketua OC Pusat, dan Ketua ISEI Lampung)
11.00 – 13.00	Sholat Jum'at dan Makan Siang
13.00 – 15.00	<i>Paket Wisata</i>

**SINTESA INKLUSI KEUANGAN DAN SINERGITAS BUMN:
USULAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Felia Novianti¹, Rina Rosalina², Adhitya Wardhono³

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui akselerasi program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menyebabkan masyarakat tingkat bawah mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal, sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan peran BUMN dalam mendorong tingkat inklusi keuangan yang selanjutnya dapat mereduksi kemiskinan. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif naratif dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tingkat inklusi keuangan di Indonesia, menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Jika akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan semakin mudah maka tingkat kemiskinan diindikasikan semakin menurun. Peran BUMN dalam mendorong inklusi keuangan merupakan hal yang penting dilihat dari peningkatan program-program yang dilakukan baik oleh BUMN perbankan maupun non perbankan demi mendorong sistem keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, optimisasi peran BUMN dalam memberikan layanan inklusi keuangan perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Inklusi Keuangan, BUMN, Kemiskinan

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) have an important role in reducing poverty through the acceleration of financial inclusion programs proclaimed by the government. The low level of financial inclusion in Indonesia has led to lower levels of people experiencing difficulties in accessing formal financial services, resulting in an economic disparity. This study aims to analyze the relevance of the role of SOEs in encouraging the level of financial inclusion which in turn can reduce poverty. The analytical method used is narrative descriptive analysis and literature study. Based on the analysis conducted at the level of financial inclusion in Indonesia, indicating that financial inclusion is closely related to the poverty level. If public access to financial institutions becomes easier then the level of poverty is indicated to decrease. The role of SOEs in fostering financial inclusion is critical to the improvement of programs by both state and non-banking SOEs in order to foster an inclusive financial system. Therefore, the optimization of the role of SOEs in providing financial inclusion services needs to be improved.

Keywords: financial inclusion, State-Owned Enterprises (SOEs), Poverty

¹Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia. Alamat: Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, Indonesia – Kode Pos (68121), Tel. (+62)81249092171, e-mail: felia.novianti26@gmail.com

²Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas jember, Indonesia. Alamat: Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, Indonesia – Kode Pos (68121), Tel. (+62)81249092171, e-mail: rina.rosalina163@gmail.com

³Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas jember, Indonesia. Alamat: Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur, Indonesia – Kode Pos (68121), Tel. (+62)81249092171, e-mail: adhitya.wardhono@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Isu ketimpangan di berbagai aspek baik ekonomi dan sosial telah menjadi isu hangat yang banyak diperdebatkan di berbagai negara di dunia (Laxmi Mehar, 2014; Ouma, Odongo, & Were, 2017; Zins & Weill, 2016). Ekspansi ekonomi yang cepat dan pembangunan yang hanya mengacu pada pertumbuhan perekonomian memicu masalah ketimpangan dan kemiskinan. Kondisi ini diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam proses pemerataan pembangunan dan pembangunan ekonomi yang masih terpusat pada daerah perkotaan (Allen, Demircuc-Kunt, Klapper, & Martinez Peria, 2016; Chauvet & Jacolin, 2017; Mehrotra & Yetman, 2015). Kesenjangan muncul dalam tataran pembangunan ekonomi-sosial yang tidak merata. Berbagai kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan telah dilakukan di berbagai negara, salah satunya adalah melalui program inklusi keuangan (Bansal, 2014; Fungacova Zuzana, 2014). Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan akses terhadap layanan keuangan dan kredit yang dibutuhkan oleh golongan rentan dan berpenghasilan rendah (Swamy, 2014; Zins & Weill, 2016). Selain itu inklusi keuangan didefinisikan secara luas, mengacu pada akses universal ke berbagai layanan keuangan dengan biaya yang rasional (Ouma et al., 2017; Swamy, 2014; Zins & Weill, 2016). Inklusi keuangan telah menjadi pilar utama pengembangan-kebijakan di kebanyakan negara di dunia. Hal ini berawal dari kesadaran bahwa sistem keuangan inklusif sangat penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif (Chang, 2014; McKinley, 2010).

Dampak inklusi keuangan secara umum adalah pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan upaya untuk pengentasan kemiskinan (Uddin, Shahbaz, Arouri, & Teulon, 2014). Dengan adanya inklusi keuangan, penduduk golongan rentan dan berpenghasilan rendah diharapkan mampu berinvestasi pada aset fisik dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Triki & Faye, 2013; Zins & Weill, 2016). Pola pembangunan ekonomi di negara berkembang yang masih tertuju pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek pemerataan merupakan salah satu penyebab dari masalah ketimpangan. Fenomena ketimpangan dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.

Kebijakan yang mendukung program inklusi keuangan di Indonesia telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui BUMN memberikan layanan terkait dengan upaya peningkatan inklusi keuangan berupa pelayanan kemudahan akses. Strategi yang digunakan oleh BUMN adalah dengan melakukan inovasi teknologi yang membantu dalam menyediakan kemudahan layanan kepada masyarakat. Berbagai penelitian tentang upaya penurunan tingkat ketimpangan telah banyak dilakukan sebelumnya. Pendekatan metode analisis yang berbeda dan fenomena yang terjadi di masing-masing negara memberikan hasil yang beragam terkait dengan inklusi keuangan. Temuan empiris oleh Park & Mercado (2015) menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di seluruh negara berkembang di Asia. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar *et. al.*, (2016) bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inklusi keuangan merupakan program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan dalam jangka panjang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif kualitatif pada fenomena inklusi keuangan yang ditinjau dari sinergitas BUMN. Pada saat ini pemerintah telah memberikan layanan inklusi keuangan melalui BUMN yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

METODE RISET

Metode yang digunakan dalam tulisan ini berupa analisis deskriptif naratif dan studi literatur (Baskerville, Pentland, & Walsham, 1994; Salampasis & Mention, 2018). Analisis deskriptif naratif bertujuan untuk memaparkan konsep sinergitas peran kemitraan BUMN dalam mendorong inklusi keuangan dan dalam jangka panjang mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Studi literatur dilakukan pada berbagai hasil penelitian dan fakta empiris untuk memperkuat usulan konsepsi yang disusun dalam tulisan ini. Objek penelitian dalam tulisan ini ialah inklusi keuangan dan kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu 2008-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Konsep Inklusi Keuangan Di Indonesia

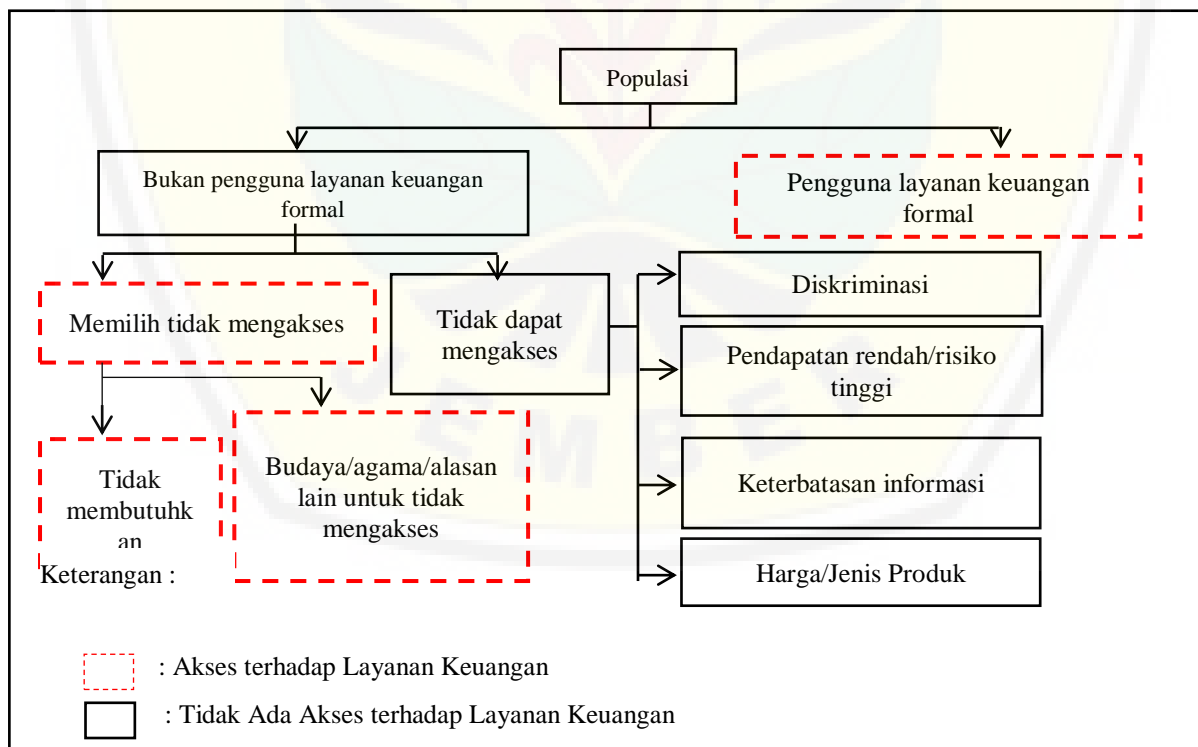
Perwujudan inklusi keuangan yang didefinisikan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ternyata belum terpenuhi secara optimal. Fenomena yang terjadi hanya sekitar 50 persen masyarakat di dunia tidak memiliki akses terhadap perbankan (*Global Financial Development Report*, 2014). Rendahnya akses terhadap layanan keuangan

ini merupakan salah satu penyebab adanya ketimpangan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang lambat (Beck, *et al.*, 2009). Oleh karena itu penurunan angka ketimpangan dan memperluas akses menjadi tantangan di seluruh dunia, sehingga memerlukan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas jasa keuangan untuk merancang kebijakan yang efektif dapat meningkatkan inklusi keuangan serta mengurangi kesenjangan (Bank Indonesia, 2014).

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dijelaskan oleh Bank Indonesia (2014), keuangan inklusif didefinisikan sebagai:

“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil”.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan. Sasaran inklusi keuangan di Indonesia yaitu masyarakat yang memiliki karakteristik berpenghasilan rendah, masyarakat pinggiran dan masyarakat minoritas (Bank Indonesia, 2014).

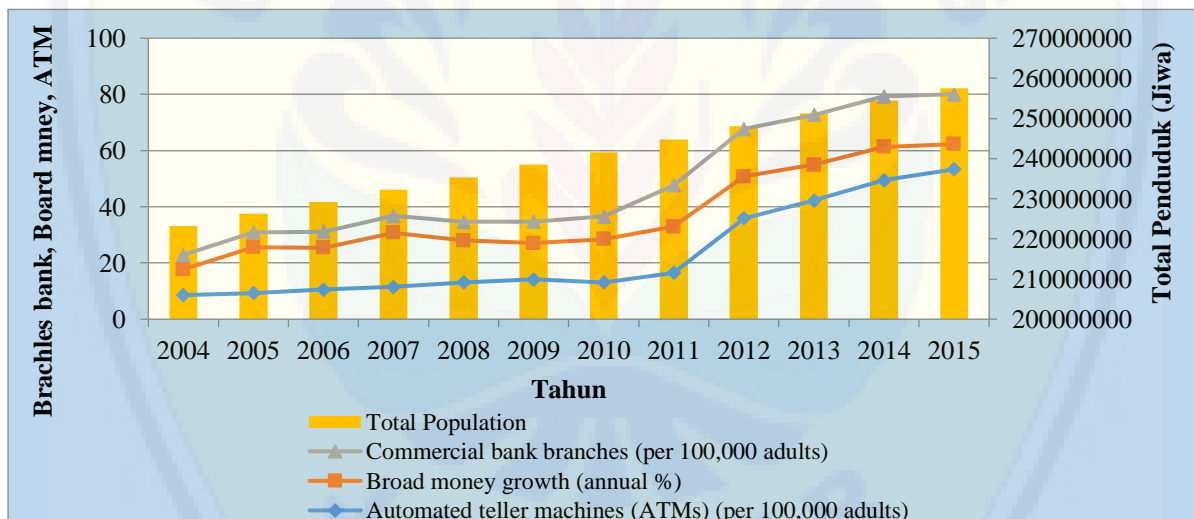


Gambar 2 Akses terhadap Layanan Jasa Keuangan (Sumber: Demirguc-Kunt, 2008)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Demirguc-Kunt (2008), menjelaskan bahwa terdapat dua kategori populasi yang tidak mendapat layanan jasa keuangan yaitu

populasi yang tidak membutuhkan atau mempunyai alasan sehingga tidak ingin menggunakan jasa keuangan dan populasi yang ingin menggunakan layanan jasa keuangan namun memiliki hambatan untuk mengaksesnya. Hambatan yang dimiliki oleh populasi yang tidak dapat mengakses layanan jasa keuangan karena beberapa hambatan disebut *involuntary exclusion*. Hambatan tersebut diantaranya berupa pendapatan yang tidak mencukupi; adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan sosial, agama, atau etnis; biaya untuk menjangkau populasi tertentu terlalu mahal untuk komersial; dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3. Pada tahun 2004 hingga 2015, populasi penduduk Indonesia cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aguera (2015) yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat di dunia tidak memiliki rekening di lembaga keuangan formal.



Gambar 3 Perkembangan Inklusi Keuangan Indonesia (Sumber: *Worldbank*, diolah, 2017)

Masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di desa merupakan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki layanan keuangan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh tempat layanan jasa keuangan yang sangat jauh sehingga memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Secara umum, kendala tersebut berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Hal ini menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Fenomena ini menunjukkan terjadinya ketimpangan literasi keuangan antar daerah di Indonesia.

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif Perkembangan Inklusi Keuangan Di Indonesia

	ATM	BM	CBB	POP
Mean	23.12593	14.00545	10.79739	2.40E+08
Median	13.62747	14.93303	7.885668	2.40E+08
Maximum	53.31128	19.32512	17.93057	2.58E+08
Minimum	8.563816	8.996990	5.166452	2.23E+08
Std. Dev.	16.93772	3.015543	5.612837	11287543

Sumber: World Bank, 2017, diolah

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 menjelaskan bahwa setiap perubahan pada masing-masing variabel mengalami fluktuasi yang terlihat dari perbedaan nilai maksimum dan nilai minimum. Secara rinci, pada indikator jumlah ATM di Indonesia mengalami perbedaan yang tinggi dengan nilai maksimum sebesar 53,31 dan nilai minimum sebesar 8,56. Sementara jika dilihat dari persebaran data menunjukkan persebaran data yang baik terlihat dari standart deviasi yang lebih rendah dari pada nilai rata-rata. Hasil yang sama ditunjukkan oleh indikator jumlah uang beredar yang mengalami fluktuasi disebabkan terdapat perbedaan besar pada nilai maksimum dengan nilai sebesar 19,32 dan nilai minimum sebesar 8,99. Pada persebaran data jumlah uang beredar juga mengalami persebaran data baik yang ditunjukkan dengan nilai standart deviasi sebesar 3,01 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 14,01.

Perbedaan nilai maksimum pada variabel jumlah cabang bank yang sebesar 17,93 dan nilai minimum sebesar 5,16 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi pada perkembangan jumlah cabang bank di Indonesia. Sementara pada perkembangan jumlah penduduk juga memperlihatkan terjadinya fluktuasi yang terlihat pada perbedaan nilai maksimum sebesar 2,58 dan nilai minimum sebesar 2,23. Disisi lain, jika dilihat pada persebaran data untuk variabel jumlah cabang bank dan jumlah penduduk mengalami persebaran data baik yang terlihat dari nilai standart deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

2. Preskripsi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan di desa dan kemiskinan di kota. Berikut data kemiskinan di Indonesia berdasarkan kemiskinan di kota dan di desa pada tahun 2006-2017. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2006-2017 cenderung mengalami penurunan. Namun secara statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di wilayah pedesaan (ADB, 2015). Meski tingkat kemiskinan mengalami penurunan namun tingkat kesenjangan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian baik secara makroekonomi maupun non makroekonomi kurang mendukung untuk mencapai target penurunan (Bappenas. 2013).

Pada Tabel 2 disajikan hasil analisis statistik deskriptif mengenai fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 2 Analisis Statistik Diskriptif Perkembangan Penduduk Miskin Berdasarkan Kota dan Desa di Indonesia

	Kota	Desa
Mean	10.86941	18.24588
Median	10.72000	18.93000
Maximum	14.60000	24.84000
Minimum	7.730000	13.76000
Std. Dev.	2.327613	3.450484

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017, diolah

Perkembangan penduduk miskin berdasarkan wilayah kota dan desa di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. Pada perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kota di Indonesia terlihat mengalami fluktuasi. Hasil ini terlihat dari perbedaan nilai maksimum sebesar 14,6 dengan nilai minimum sebesar 7,73. Jika dilihat dari persebaran data terlihat mengalami persebaran data baik yang terlihat dari nilai standart deviasi sebesar 2,32 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 10,86. Sementara pada perkembangan jumlah penduduk miskin berdasarkan desa juga menunjukkan terjadinya fluktuasi. Kondisi ini dapat dilihat dari besarnya perbedaan antara nilai maksimum sebesar 24,84 dengan nilai minimum sebesar 13,76. Di sisi lain, persebaran data jumlah penduduk miskin yang membandingkan nilai standart deviasi sebesar 3,45 dengan nilai rata-rata sebesar 18,24 menunjukkan hasil bahwa terdapat persebaran data baik.

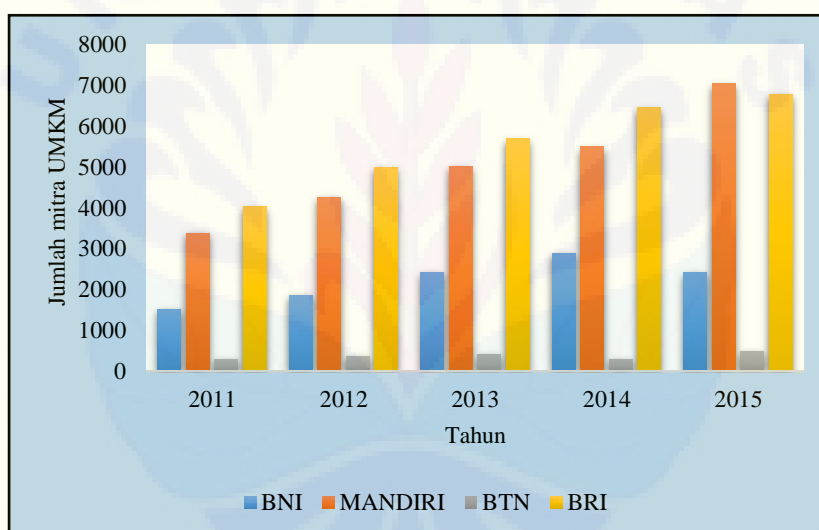
Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui sistem inklusi keuangan terlebih sejak terjadinya krisis keuangan global 2008. Inklusi keuangan menjadi hal yang penting karena masyarakat Indonesia cenderung masih bersifat *financial exclusion*. Sistem keuangan yang inklusif dapat memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Sinergitas BUMN Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Sistem keuangan yang inklusif memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Inklusi keuangan mengindikasikan adanya pemberdayaan individu atau kelompok masyarakat, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil survei Bank Dunia (2014) menunjukkan bahwa hanya terdapat 36,1 persen orang dewasa (*adult*) di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sementara di Singapura tercatat sebesar 96,4 persen orang

dewasa (*adult*) yang memiliki rekening, Malaysia sebesar 80,7 persen dan Thailand sebesar 78,1 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan meningkat menjadi sebesar 67,82 persen pada tahun 2016.

Pemerintah terus melakukan perbaikan program dalam upaya menekan kemiskinan, salah satunya melalui kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik perbankan maupun non perbankan dalam hal kemudahan akses keuangan. Salah satu contoh dari kemudahan akses keuangan yaitu kemudahan dalam mendapatkan kredit usaha. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat literasi dan perkembangan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan inklusi keuangan OJK pada tahun 2016 mencatat bahwa indeks literasi



sebesar 29,7% dan indeks inklusi 67,8% dibanding dengan tahun 2013 dimana indeks literasi keuangan 21,8% dan indeks inklusi 59,7%.

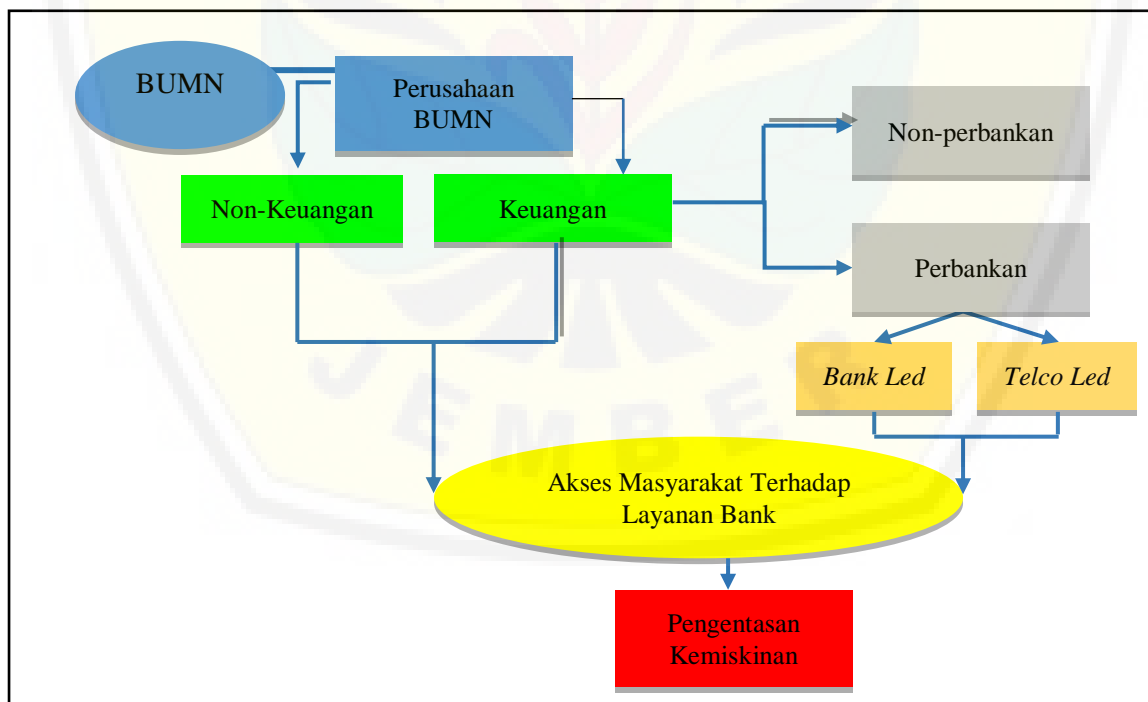
Gambar 4 Potensi Jumlah Mitra UMKM Bank BUMN Tahun 2011-2015 (Sumber: Tampubolon, *et. al.*, 2017)

Gambar 4 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada perkembangan jumlah kemitraan UMKM Bank BUMN pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Perkembangan jumlah mitra BTN lebih rendah jika dibandingkan dengan bank lainnya yaitu hanya mencapai titik maksimum sebesar 494 pada tahun 2015. Sementara perkembangan jumlah mitra dari Bank BRI mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan merupakan bank BUMN yang memiliki mitra terbanyak diantara bank-bank lainnya. Peningkatan perkembangan jumlah mitra pada Bank Mandiri terlihat meningkat sampai pada tahun 2015

yang mencapai 7040. Berbeda dengan hasil yang ditunjukkan oleh mitra Bank BNI yang mengalami peningkatan pada tahun 2014 yang mencapai 2880, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan jumlah mitra mencapai 2427.

3. Sintesa Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi BUMN dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Sebuah Usulan Konseptional

Posisi BUMN memberikan dampak strategis dalam pencapaian program inklusi keuangan di Indonesia. Beberapa perusahaan BUMN terutama yang bergerak di bidang keuangan memiliki layanan jasa keuangan yang potensial untuk mendukung akselerasi program inklusi keuangan. Program inklusi keuangan erat kaitannya dengan perkembangan teknologi modern. Perkembangan era ekonomi digital saat ini dapat memberikan peluang untuk mengakselerasi program inklusi keuangan melalui berbagai bentuk usaha yang berbasis *financial technology*. Produk-produk yang ditawarkan oleh BUMN sektor keuangan maupun non keuangan memiliki bentuk yang beragam dalam memberikan layanan bagi masyarakat demi mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Berikut adalah usulan skema langkah strategis BUMN dalam mengakselerasi program inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan.



Gambar 5. Usulan Skema Langkah Strategis BUMN dalam Mendukung Akselerasi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan strategi yang dikembangkan oleh Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil terlebih pasca

terjadinya krisis global 2008. Bank Indonesia menyebutkan terdapat tiga poin penting yang menjadi indikator dalam strategi inklusi keuangan meliputi akses, penggunaan dan kualitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan bahwa keuangan inklusif menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Strategi tersebut diharapkan dapat mereduksi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan tidak hanya terbatas pada peran lembaga perbankan namun memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak diantaranya lembaga keuangan BUMN. Hal tersebut dikarenakan BUMN memiliki potensi strategis dalam mendukung inklusi keuangan dengan menjalin kerjasama antar BUMN maupun antara BUMN dengan UMKM yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Potensi ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi melalui program *financial technology (fintech)*.

BUMN terdiri dari sektor keuangan yang terdiri dari lembaga perbankan dan non perbankan serta sektor non keuangan yang saling bekerjasama untuk mendukung inklusi keuangan. Demi mendukung akselerasi program inklusi keuangan, BUMN menjalankan program-program dengan berbasis *fintech*. Lembaga BUMN kategori perbankan dapat mengeluarkan program *Bank Led* dan *Telco Led model* untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. *Bank Led model* merupakan implementasi pengembangan bank tanpa kantor (*branchless banking*) dan seluruh tanggung jawab atas kegiatan perbankan ditanggung oleh bank itu sendiri. Sementara *Telco Led model* merupakan implementasi pengembangan layanan keuangan dimana lembaga keuangan bekerjasama dengan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pihak yang bertanggung jawab atas semua kegiatan layanan keuangan adalah perusahaan telekomunikasi.

Sektor non perbankan BUMN juga perlu melakukan upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan menerapkan sistem pembayaran berbasis *fintech* sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai proses pembayaran secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem pembayaran yang berbasis *fintech* juga dapat membantu masyarakat yang *unbankable* untuk menggunakan layanan keuangan. Kemudahan masyarakat dalam melakukan proses pembayaran dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dapat mendorong inklusi keuangan melalui indikator penggunaan.

Upaya mendorong inklusi keuangan yang dilakukan oleh BUMN salah satunya adalah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program tersebut merupakan salah satu program yang bergerak pada sektor pembiayaan UMKM dan pembinaan

lingkungan. Program Kemitraan (PK) berupa pemberian kredit atau modal usaha bagi individu atau kelompok masyarakat yang akan atau telah memiliki usaha. Dana program kemitraan diarahkan pada permodalan kerja maupun investasi yang bersifat produktif sehingga akan memengaruhi produktifitas dan meningkatkan kapasitas penjualan dan produksi. Sementara Bina Lingkungan (BL) merupakan pembiayaan bagi sektor non produktif meliputi biaya pendidikan atau pelatihan, kesehatan, korban bencana alam, sarana ibadah, kegiatan sosial kemasyarakatan, pengembangan sarana umum, pelestarian alam dan mitra binaan.. Alokasi dana PKBL yaitu sebesar 2 persen untuk Program Kemitraan (PK) dan 2 persen untuk Bina Lingkungan (BL) dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan BUMN.

Bentuk kemitraan lain yang dilakukan oleh BUMN untuk mendorong inklusi keuangan ialah berupa kerja sama antar BUMN sektor keuangan dengan membentuk *Holding* BUMN jasa keuangan. *Holding* BUMN merupakan pembentukan perusahaan induk yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang disetujui oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. *Holding* BUMN jasa keuangan dipimpin oleh empat bank BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Nasional (BTN), dan Bank Mandiri serta BUMN non perbankan seperti PT Pegadaian dan PT Permodalanm Nasional Madani (PNM).

Salah satu produk yang juga dikeluarkan oleh BUMN sektor perbankan dalam upaya mempercepat inklusi keuangan yaitu BNI SimPel (Tabungan Simpana Pelajar). Karakteristik dari SimPel disiapkan untuk pelajar untuk mempercepat pengenalan produk simpanan layanna keuangan. BNI SimPel memiliki karakteristik yaitu persyaratan yang mudah seperti setoran awal dan setoran selanjutnya, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat melakukan transaksi di seluruh cabang BNI. Selain digunakan sebagai tabungan pelajar SimPel digunakan untuk mencairkan dana PIP (Program Indonesia Pintar).

Giat pemerintah dalam mendukung inklusi keuangan direspon positif oleh berbagai pihak. Sebagai contoh lembaga keuangan non perbankan PT Asuransi meluncurkan aplikasi *JS Simple Protection* untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat di daerah yang sulit terjangkau institusi keuangan. Aplikasi tersebut membantu masyakat kemudahan asuransi dan membantu program inklusi keuangan di Indinesia karena terdapat informasi yang tersedia dari hulu ke hilir. Jiwasraya adalah satu-satunya asuransi jiwa yang dimiliki BUMN.

Mekanisme inklusi keuangan juga dicanangkan oleh lembaga Pegadaian dimana pengembangan berbagai jenis produk yang memiliki tiga fase awal seperti pemberian kredit gadai agunan emas dan non emas, fase kedua mencakup pemberian kredit fidusia dan fase

ketiga seperti gadai bisnis, gadai fleksi, arum haji. Selain itu, Pegadaian juga mengeluarkan program Tabungan emas dimana *point of sales* telah tersebar sampai tingkat keluarahan. Untuk mempermudah pelayanan, Pegadaian memiliki mobil keliling dan *open table* untuk menjangkau masyarakat.

PT Pos Indonesia juga memberi kontribusi dalam mendorong inklusi melalui layanan tabungan untuk mendorong inklusi keuangan. Namun teknik yang dilakukan adalah PT Pos Indonesia hanya diperbolehkan untuk menyerap dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan layanan kredit. Namun, program tersebut masih menunggu keputusan atau peraturan pemerintah.

Peningkatan akses masyarakat khususnya yang memiliki pendapatan rendah dan masuk dalam kategori masyarakat miskin terhadap layanan jasa keuangan merupakan indikator penting bagi pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Indikator keberhasilan inklusi keuangan khususnya dalam mengurangi kemiskinan ditentukan oleh sinergitas berbagai pihak yaitu pemerintah, BUMN dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan skema atau model langkah strategis BUMN dalam mengakselerasi inklusi keuangan yang melibatkan semua pihak terkait khususnya lembaga BUMN dan masyarakat agar mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Model strategis sinergi BUMN dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia tersebut merupakan model operasional yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Model strategis sinergi antara pemerintah, BUMN dan masyarakat/UMKM tersebut merupakan pendekatan yang optimal untuk mencapai pertumbuhan sistem keuangan inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis sinergitas peran BUMN dalam memberikan layanan inklusi keuangan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kami menggunakan analisis deskriptif narrative untuk menjelaskan dinamika sinergitas peran BUMN dalam memberikan layanan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran BUMN dalam memberikan layanan inklusi keuangan mampu memberikan stimulus pada tingkat ketimpangan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks Gini Indonesia yang semakin memiliki tren penurunan, kemudian juga diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Program inklusi keuangan di Indonesia adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Program

tersebut memaparkan bahwa masyarakat miskin perlu mendapatkan akses terhadap layanan jasa keuangan agar dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mengakselerasi sistem keuangan yang inklusif dapat diwujudkan melalui kemitraan antara BUMN, swasta dan UMKM dengan berbagai program strategis, efektif dan efisien.

REFERENSI

- Aji, P. (2015). Summary of Indonesia's Poverty Analysis. *Asian Development Bank*, (9), 4.
- Alliance for Financial Inclusion (2011). *The G20 Principles for Innovative Financial Inclusion: Bringing the Principles to Life: Eleven country case studies*. Bangkok: Alliance for Financial Inclusion.
- Allen, F., Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27(2016), 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Bansal, S. (2014). Perspective of Technology in Achieving Financial Inclusion in Rural India. *Procedia Economics and Finance*, 11(14), 472–480. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00213-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00213-5)
- Bappenas. (2006). Poverty reduction in Indonesia: A brief review of facts, effort and ways forward. *Forum on National Plans and PRSPs in East Asia*, 1–12.
- Baskerville, R., Pentland, B. T., & Walsham, G. (1994). Two Techniques for Qualitative Data Analysis: Descriptive Narrative and Generalization. *Information Systems*, 503–504.
- Chang, C. (2014). What is Inclusive Growth? *Distribution*, (August), 1–18.
- Chauvet, L., & Jacolin, L. (2017). Financial Inclusion, Bank Concentration, and Firm Performance. *World Development*, xx. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.018>
- Danquah, M., & Ohemeng, W. (2017). Unmasking the factors behind income inequalities in Ghana. *International Journal of Social Economics*, 44(7), 884–899. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0250>
- Fungacova Zuzana, L. W. (2014). Understanding Financial Inclusion in China. *China Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.004>
- Hajilee, Massomeh (2012). *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*: Bandung
- Iryanti, R. (2014). Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia : Permasalahan dan Tantangan. *Kementerian PPN/Bappenas*, (September), 1–31. Retrieved from http://msc.feb.ugm.ac.id/msc-new/images/stories/berita/seminar_kemiskinan/1.pdf

- Laxmi Mehar. (2014). Financial Inclusion in India – An Assessment. *Innovative Journal of Business and Management*, (July-August), 42–46.
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: an inclusive growth index for diagnosis of country progress. *Asian Development Bank Working Paper*, (14), 1–34. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Inclusive+Growth+Criteria+and+Indicators+:+An+Inclusive+Growth+Index+for+Diagnosis+of+Country+Progress#0>
- Mehrotra, A., & Yetman, J. (2015). Financial inclusion – issues for central banks. *BIS, Quarterly Review*, (March), 83–96.
- Nizar, A., Nurdin, A. A., Kadir, A., & Thabrany, H. (2017). Equity in Utilization of Inpatient for National Health Insurance (JKN) Program in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (ISJBAR)*, 4531, 58–74.
- Ouma, S. A., Odongo, T. M., & Were, M. (2017). Mobile financial services and financial inclusion: Is it a boon for savings mobilization? *Journal of Advanced Research*. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.01.001>
- Salampasis, D., & Mention, A.-L. (2018). *FinTech: Harnessing Innovation for Financial Inclusion. Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 2* (1st ed., Vol. 2). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812282-2.00018-8>
- Sarma, M (2008). Index of Financial Inclusion. *Working Paper No.215. Indian Council For Research On International Economic Relations*
- Santelli, J. S., Song, X., Garbers, S., Sharma, V., & Viner, R. M. (2017). Global Trends in Adolescent Fertility, 1990–2012, in Relation to National Wealth, Income Inequalities, and Educational Expenditures. *Journal of Adolescent Health*, 60(2), 161–168. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.08.026>
- Schumpeter, J (1911). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Swamy, V. (2014). Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. *World Development*, 56, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019>
- Triki, T., & Faye, I. (2013). Financial inclusion in Africa: an overview. *African Development Bank*, 148. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084599
- Uddin, G. S., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2014). Financial development and poverty reduction nexus: A cointegration and causality analysis in Bangladesh.

Economic Modelling, 36, 405–412. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.09.049>

Undurraga, E. A., Nica, V., Zhang, R., Mensah, I. C., & Godoy, R. A. (2016). Individual health and the visibility of village economic inequality: Longitudinal evidence from native Amazonians in Bolivia. *Economics and Human Biology*, 23, 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2016.06.004>

World Bank. (2008). *Policies and Pitfalls in Expanding Access. Finance*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7291-3>

Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>

Internet :

BadanUsahaMilikNegara 2017 (<http://infopkbl.bumn.go.id/>) diakses 23 September 2017

Bank Indonesia I 2017 (<http://bi.go.id/>) diakses 23 September 2017

OtoritasJasaKeuangan 2017 (<http://ojk.go.id/>) diakses 23 September 2017

PemerintahKabupatenBanyuwangi 2016 (<http://banyuwangi.go.id/>) diakses 23 September 2017

PT. PermodalanNasionalMadani (<http://pnm.co.id/>) diakses 23 September 2017

Worldbank 2017 (<https://data.worldbank.org/>) diakses 21 September 2017